BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permukiman merupakan tempat tinggal bagi manusia yang terdiri dari sekelompok rumah atau bangunan yang saling berdekatan dan memiliki ciri khas tertentu. Permukiman adalah kawasan lingkungan di perkotaan dan perdesaan yang mempunyai sarana dan prasarana lingkungan hidup untuk menunjang kegiatan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap hunian sementara.[1] Wilayah perkotaan merupakan wilayah di mana sebagian besar masyarakat tinggal. Namun ketidakmerataan finansial sering kali menghasilkan wilayah kumuh di sekitar wilayah urban ini. Minimnya pendanaan menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain munculnya permukiman yang tidak terencana sehingga menciptakan permukiman kumuh.

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dapat terjadi di perkotaan. Tak terkecuali kota-kota di Indonesia yang menghadapi masalah meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan. Pertumbuhan penduduk di perkotaan, tingginya jumlah penduduk miskin dan berpendapatan rendah, serta laju urbanisasi dapat menyebabkan meluasnya permukiman kumuh.[2] Penduduk perkotaan diperkirakan akan terus tinggal di permukiman kumuh hingga luas permukiman kumuh di seluruh kota di dunia meningkat dua kali lipat pada tahun

---

[1] Raisha Ghadati Raudina, "Pola Permukiman di Sepanjang Jalur Kereta Api Kota Medan," *Talenta Publisher* 5, no. 1 (2022): 518–522.

[2] Rika Afrilla, *Keadaan Sosial Budaya Penduduk di Permukiman Kumuh Pinggir Rel Kereta Api Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat* (tesis, Digital Repository Universitas Negeri Medan, 2012), diakses April 2024, http://digilib.unimed.ac.id/17297/.

2030. Faktanya, diperkirakan hampir satu dari tiga penduduk perkotaan di negara-negara berkembang mungkin tinggal di permukiman kumuh atau informal. Dalam merespon tantangan tersebut, kota-kota di dunia termasuk Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan cities without slum sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) poin kesebelas melalui penciptaan kota dan komunitas yang berkelanjutan.[3]

Saat ini terdapat beberapa permasalahan permukiman yang terjadi pada permukiman tidak terencana khususnya di Indonesia. Padahal, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini erat kaitannya dengan permukiman tidak terencana. Namun, karena meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya permintaan akan lahan, pemukiman tidak terencana terus terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Berikut data pemukiman dan perumahan di kota Jakarta dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Menurut Badan Pusat Statistik kota Jakarta:

Tabel 1.1 Proporsi Pemukiman dan Perumahan di Kota Jakarta

38 Provinsi	Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi					
	Milik Sendiri			Kontrak / Sewa		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
DKI JAKARTA	48,48	56,13	56,57	34,63	25,47	22,82

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

[3] Novia Cecilia Medina dan S. Sunarti, "Aset Penghidupan Masyarakat dalam Mencegah Kekumuhan di Dusun Deliksari, Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Arsitektur* 12, no. 2 (2022): 45–54.

Berdasarkan tabel di atas jumlah pemukiman dan perumahan di kota Jakarta pada tahun 2021 yang merupakan milik sendiri sebesar 48,48% dan bertambah 7,65% pada tahun 2022 yaitu 56,13% dan 56,57% pada tahun 2023. Adapun yang merupakan kontrak/sewa sebesar 34,63% pada tahun 2021, 25,47% pada tahun 2022, dan 22,82% pada tahun 2023. Ada banyak faktor penyebab terjadinya peningkatan tersebut di antaranya ialah faktor permukiman tidak terencana. Secara umum, permukiman liar atau permukiman tidak terencana adalah permukiman yang terbangun pada lahan kosong di kota, baik milik swasta ataupun pemerintah tanpa hak legal terhadap lahan dan/atau izin dari pemilik lahan. Permukiman tidak terencana ini berasal dari masyarakat dengan standar ekonomi dan pendidikan yang rendah dan masyarakatnya bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. [4]

Permukiman tidak terencana menjadi lebih umum terjadi di wilayah perkotaan, karena perpindahan penduduk yang cepat tidak sebanding dengan kapasitas layanan perkotaan. Permukiman ini berkembang tanpa melalui proses perencanaan yang matang. Permukiman ini sering kali memiliki kondisi yang kumuh, seperti sanitasi yang buruk, akses jalan yang sempit, dan bangunan yang tidak layak huni. Banyak penghuni di permukiman ini yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Permukiman ini sering kali tidak memiliki akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan pendidikan.

Pembangunan permukiman yang tidak terencana di kota-kota besar diyakini menjadi penyebab berbagai permasalahan akibat aktivitas menyimpang

[4] Rulli Pratiwi Setiawan. (2010). Penggusuran Permukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme.

seperti kriminalitas dan kejahatan sosial lainnya. Kawasan perkeretaapian, khususnya yang berada di wilayah perkotaan, kerap kali menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal. Hal ini tak terkecuali dengan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang berada di pinggir rel kereta api (KA). Meskipun tinggal di pinggir rel kereta api memiliki kelebihan dari segi aksesibilitas dan harga sewa yang terjangkau, namun kenyataannya kawasan tersebut juga memiliki berbagai permasalahan.

Tanah Abang sebuah wilayah perkotaan yang merupakan pusat perdagangan yang sibuk di Jakarta, kita dapat melihat kompleksitas sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola permukiman masyarakat. Area pinggir rel kereta api, yang mungkin dulunya hanya dianggap sebagai ruang terbuka atau infrastruktur transportasi, telah menjadi tempat bagi sejumlah besar penduduk yang membangun rumah dan beraktivitas di sekitarnya. Salah satu faktor yang mungkin mendorong masyarakat untuk tinggal di area pinggir rel kereta adalah keterbatasan akses terhadap tempat tinggal yang terjangkau. Dalam kondisi urban yang padat seperti Tanah Abang, harga tanah dan properti di dalam kota bisa sangat tinggi, sehingga masyarakat dengan pendapatan rendah atau terpinggirkan secara ekonomi cenderung mencari tempat tinggal alternatif yang lebih terjangkau, meskipun mungkin berada di lokasi yang tidak aman atau tidak nyaman dan menciptakan permukiman kumuh. Pemukiman kumuh merupakan pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.[5]

Selain itu, ada juga dinamika sosial yang mungkin mempengaruhi pola permukiman di area pinggir rel kereta api. Misalnya, ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh pemerintah atau masyarakat yang lebih mapan, sehingga mereka cenderung berkumpul dan membangun komunitas di tempat-tempat yang kurang terawat atau terlupakan seperti pinggir rel kereta api. Namun, tinggal di area pinggir rel kereta api juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri. Lokasi tersebut mungkin rentan terhadap bahaya fisik seperti kecelakaan kereta atau kebakaran, serta memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Permukiman di area pinggir rel kereta api (KA) seringkali memiliki berbagai permasalahan yang kompleks, seperti keamanan, kesehatan, dan sosial. Permasalahan ini dapat membahayakan keselamatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sana. Risiko kecelakaan KA selalu mengintai masyarakat yang tinggal di area pinggir rel. Hal ini dapat menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan harta benda.

Permukiman di area pinggir rel KA sering kali menjadi tempat rawan tindak kriminalitas, seperti pencurian, penjambretan, dan perampokan. Risiko kebakaran juga tinggi di area pinggir rel KA, terutama di permukiman yang kumuh dan padat penduduk. Kebisingan dari kereta api yang melintas dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres, dan insomnia. Asap dan debu dari

[5] Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, *2*(1), 1-23.

kereta api dapat menyebabkan penyakit pernapasan, seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Permukiman di area pinggir rel KA sering kali tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, seperti air bersih dan toilet. Hal ini dapat menyebabkan penyakit pencernaan dan infeksi. Selain itu, stigma sosial juga dapat melekat pada masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api, yang dapat menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses ke layanan atau kesempatan ekonomi yang lebih baik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 pasal 178 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak pula alat transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, seperti bus, kereta api, dan pesawat. Pertumbuhan penduduk juga mendorong berkembangnya kawasan permukiman di sekitar stasiun dan jalur kereta api. Menurut UU RI No. 13 (1992) kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Kereta api merupakan alat transportasi yang ramah polusi tetapi menghasilkan kebisingan yang dihasilkan dari mesin lokomotif, klakson, gesekan roda, dan gerbong kereta api.[6]

Keterbatasan lahan membuat harga jual menjadi mahal yang mengakibatkan penduduk yang ekonominya rendah tidak mampu membelinya.

[6] Hikmah Ayumna. (2022). Efektivitas Jalur Hijau dalam Mengurangi Kebisingan di Permukiman Sekitar Jalur Kereta Rel Listrik. Diakses dari https://osf.io/preprints/thesiscommons/uq5f4

Permukiman di area pinggir rel kereta api (KA) merupakan fenomena yang sering dijumpai di berbagai kota di Indonesia. Permukiman ini umumnya didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat tersebut sering kali tidak mampu membeli atau menyewa rumah di kawasan yang lebih layak huni dengan harga yang lebih tinggi. Area pinggir rel KAI menjadi alternatif yang lebih murah bagi mereka. Rel kereta api sering kali menjadi jalur yang mudah diakses untuk menuju ke tempat kerja atau pusat kegiatan ekonomi di kota. Di beberapa area, terdapat stasiun kereta api atau kawasan industri di dekat rel KAI yang menyediakan peluang kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu simpul transportasi utama di Jakarta yang memiliki peran strategis dalam mobilitas harian masyarakat, khususnya pengguna kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Terletak di jantung kota, Stasiun Tanah Abang tidak hanya menjadi titik transit bagi ribuan penumpang setiap harinya, tetapi juga menghubungkan kawasan pusat bisnis dan perdagangan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kepadatan aktivitas di stasiun ini mencerminkan tingginya arus urbanisasi dan dinamika mobilitas penduduk perkotaan.

Kedekatan Stasiun Tanah Abang dengan salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi kawasan sekitarnya. Pasar Tanah Abang, yang terletak hanya beberapa ratus meter dari stasiun, telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Dengan luas mencapai sekitar 100 hektar dan menampung lebih dari 50.000 pedagang, Pasar Tanah Abang

menawarkan berbagai macam produk tekstil dengan harga yang kompetitif. Blok A, salah satu bagian utama pasar ini, mencakup area seluas 160.000 meter persegi dan memiliki hampir 8.000 kios, menarik sekitar 80.000 pembeli pada hari-hari sibuk, dengan transaksi harian mencapai sekitar Rp 500 miliar.[7]

Keterkaitan antara stasiun dan pasar menciptakan kawasan dengan intensitas ekonomi dan mobilitas yang sangat tinggi. Namun, di balik geliat ekonomi yang masif tersebut, terdapat realitas sosial yang kerap luput dari perhatian, yakni keberadaan permukiman kumuh di bantaran rel kereta api sekitar kawasan Tanah Abang. Kehidupan masyarakat miskin kota di ruang-ruang informal ini menjadi kontras yang mencolok dengan citra kawasan pusat bisnis dan perdagangan, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai bagian dari studi tentang ketimpangan sosial dan tata ruang kota Jakarta.

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai permukiman di area rel kereta pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, ditemukan bahwa faktor ekonomi dimana masyarakat berpenghasilan rendah sering kali tidak mampu membeli atau menyewa rumah di kawasan yang lebih layak huni dengan harga yang lebih tinggi dan aksesibilitas menjadi alasan utama masyarakat memilih tinggal di area pinggir rel kereta api. Area pinggir rel KAI menjadi alternatif yang lebih murah bagi mereka dan aksebilitas juga menjadi alasan karena rel kereta api sering kali menjadi jalur yang mudah diakses untuk menuju ke tempat kerja atau pusat kegiatan ekonomi di kota. Namun, masih terdapat faktor lain yang belum diteliti secara mendalam.

---

[7] Fani Oktarina, K. R. Kurniawan, dan Y. N. Lukito, "Textile and Texture in Tanah Abang Market: Architectural Evolution from the Colonial to the Post-Colonial Era," *City, Territory and Architecture* 12, no. 7 (2025).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat pola permukiman pinggir rel kereta api Tanah Abang dan bagaimana strategi hidup masyarakat di kawasan tersebut, dampak yang diberikan terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, dan apa upaya dalam menangani permukiman di area pinggir rel kereta api. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pola dan strategi bertahan hidup dari **"Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miskin Kota di Bantaran Rel Kereta Api Kawasan Tanah Abang Jakpus"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, permukiman di bantaran rel kereta api merupakan fenomena sosial yang sering dijumpai di berbagai kota besar, termasuk Jakarta. Kawasan ini umumnya dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang terpaksa tinggal di lingkungan yang tidak layak karena keterbatasan akses terhadap perumahan yang lebih baik. Keberadaan permukiman di pinggir rel kereta api tidak hanya mencerminkan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi masyarakat miskin kota, tetapi juga menimbulkan persoalan keselamatan, legalitas, dan tata ruang perkotaan. Salah satu aspek utama yang perlu dikaji adalah pola permukiman yang terbentuk di sepanjang bantaran rel kereta api. Faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya sering kali memengaruhi struktur dan pola hunian di kawasan ini. Selain itu, masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap layanan dasar, ketidakpastian status kepemilikan lahan, serta ancaman penggusuran. Oleh karena

itu, strategi bertahan hidup yang diterapkan oleh masyarakat menjadi aspek penting dalam memahami dinamika kehidupan di bantaran rel. Di sisi lain, permasalahan permukiman di area pinggir rel kereta api juga menjadi perhatian bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya penanganan yang telah dilakukan, seperti relokasi dan penataan ulang permukiman, sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi implementasi kebijakan maupun resistensi dari masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka peneliti ingin membatasi permasalahan penelitian guna penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mempermudah melakukan penelitian. Maka permasalahan penelitian yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman di bantaran rel kereta api?
2. Bagaimana strategi bertahan hidup masyarakat bantaran rel kereta api dalam perspektif james scott?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dijabarkan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman di bantaran rel kereta api

2. Meningkatkan pemahaman tentang strategi bertahan hidup masyarakat bantaran rel kereta api
3. Memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Menambah literatur dan referensi akademik mengenai pola permukiman dan strategi bertahan hidup masyarakat di permukiman kumuh bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Tanah Abang.
2. Memberikan kontribusi teoritis dalam kajian sosiologi perkotaan, khususnya terkait fenomena kemiskinan kota, migrasi, dan adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan ruang tinggal.
3. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami lebih lanjut tentang dinamika sosial-ekonomi masyarakat di wilayah permukiman informal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merancang kebijakan perumahan dan penataan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi sosial, NGO, dan komunitas dalam merancang program pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api.
3. Memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di bantaran rel kereta api, termasuk dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat terdampak.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permukiman kumuh masyarakat miskin kota di bantaran rel kereta api kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, penelitian ini mengkaji sejumlah literatur yang relevan. Kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya dilakukan untuk membangun landasan teori yang kuat, mengidentifikasi celah atau kekhususan dalam penelitian sebelumnya, dan memastikan bahwa penelitian ini orisinal dan bebas dari duplikasi atau plagiarisme.

Skema 1.1 Peta Literatur Sejenis

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Maria Vika Wirastri, Nicky Morrison, dan Greg Paine, dengan judul **"The Connection Between Slums and COVID-19 Cases in Jakarta, Indonesia: A Case Study of Kapuk Urban Village."** Penelitian ini mengkaji tantangan dalam penanganan COVID-19 di permukiman kumuh Jakarta, dengan fokus pada Kelurahan Urban Kapuk. Faktor utama yang memperburuk penyebaran virus meliputi kepadatan penduduk tinggi, kurangnya infrastruktur dasar, akses terbatas ke air bersih dan sanitasi, serta kondisi rumah yang tidak layak dengan ventilasi buruk. Faktor sosial, seperti perilaku berisiko tinggi dan kesulitan mengikuti protokol kesehatan, juga turut berkontribusi.

Studi ini menggunakan teori ekologi sosial untuk menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan sosial dengan kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan mencakup penelitian observasional, bantuan visual, survei, wawancara, dan pengumpulan data dari instansi pemerintah terkait. Hasilnya menunjukkan korelasi signifikan antara permukiman kumuh dan tingginya kasus COVID-19, dengan hambatan tambahan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 serta keterbatasan akses terhadap tes dan perawatan medis. Penelitian ini merekomendasikan intervensi berbasis komunitas, pendekatan akupunktur perkotaan untuk menyesuaikan regulasi, dan peningkatan infrastruktur lokal guna memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pandemi. Selain itu, investasi dalam perbaikan kondisi permukiman kumuh dipandang mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kerentanan terhadap pandemi di masa depan, serta menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan tangguh. Kolaborasi lebih

lanjut diusulkan untuk memahami pengalaman masyarakat sehari-hari dan menginformasikan kebijakan serta tindakan di masa depan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Beatrice Eyram Afi Ziorklui, Seth Asare Okyere, Matthew Abunyewah, Stephen Leonard Mensah, dan Louis Kusi Frimpong yang berjudul **"Social capital and community-driven development: A multi-group analysis of migrant and indigenous informal settlements in Greater Accra, Ghana."** Penelitian tersebut mengeksplorasi hubungan antara modal sosial dan pengembangan yang didorong oleh masyarakat (Community-Driven Development/CDD) di pemukiman informal di Ghana dan membandingkan dua kelompok masyarakat: migran dan penduduk asli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua bentuk modal sosial, yaitu modal sosial ikatan (bonding) dan modal sosial jembatan (bridging), memainkan peran penting dalam membentuk hasil dan mengatasi tantangan dalam pemukiman informal. Migran dan penduduk asli memiliki tingkat modal sosial yang berbeda. Migran umumnya memiliki jaringan sosial yang lebih kuat di dalam komunitas mereka sendiri, sedangkan penduduk asli memiliki jaringan sosial yang lebih kuat dengan komunitas yang lebih luas. Penelitian tersebut menghipotesiskan bahwa modal sosial ikatan memiliki pengaruh negatif terhadap CDD, sementara modal sosial jembatan memiliki dampak positif. Penelitian dilakukan melalui desain survei lintas-seksi dengan data yang dikumpulkan dari penduduk dua pemukiman informal di Ghana.

Migran lebih terlibat dalam kegiatan pengembangan komunitas daripada penduduk asli. Hal ini mungkin karena migran lebih termotivasi untuk

meningkatkan kondisi kehidupan mereka di permukiman informal. Temuan tersebut memberikan wawasan tentang dinamika pengembangan yang didorong oleh masyarakat dan modal sosial dalam karakteristik unik pemukiman informal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal sosial dan pengembangan komunitas di permukiman informal, termasuk jenis permukiman, lama tinggal di permukiman, dan akses terhadap layanan dasar. Kesimpulannya, modal sosial memainkan peran signifikan dalam pengembangan yang didorong oleh masyarakat di pemukiman informal, dan intervensi yang spesifik terhadap konteks sangat penting untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Dylan D. Furszyfer Del Rio, dan Benjamin K. Sovacool yang berjudul **"Of cooks, crooks and slum-dwellers: Exploring the lived experience of energy and mobility poverty in Mexico's informal settlements."** Penelitian tersebut menyoroti tantangan hidup yang dihadapi penduduk di permukiman informal Meksiko. Studi ini menungkapkan realita pahit terkait keterbatasan energi dan transportasi yang dialami masyarakat miskin perkotaan. Akses listrik di permukiman informal tidak stabil dan mahal. Warga bergantung pada sumber daya tidak resmi atau solusi tambal sulam seperti kompor arang untuk memasak. Hal ini berdampak pada kesehatan pernapasan, keamanan kebakaran, dan kemampuan memperoleh penghasilan (misalnya, berjualan makanan). Transportasi publik mahal dan seringkali tidak menjangkau permukiman informal. Warga harus mengeluarkan biaya tinggi untuk bepergian ke tempat kerja, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Hal ini membatasi peluang kerja dan pendidikan, serta akses terhadap layanan sosial. Keterbatasan energi dan

mobilitas berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Mereka menghadapi stres, kerentanan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Judul penelitian menggunakan istilah provokatif ("cooks, crooks and slum-dwellers") untuk menggambarkan stereotip negatif yang dihadapi penduduk informal. Penelitian ini berupaya memahami pengalaman hidup mereka yang sebenarnya, bukan sekadar label. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan publik. Pemerintah perlu menyediakan akses energi yang terjangkau dan andal di permukiman informal. Perluasan transportasi publik yang terjangkau dan menjangkau permukiman informal juga penting. Program pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan energi dan transportasi masyarakat miskin perkotaan. Penelitian ini menyoroti penderitaan yang dialami penduduk perkampungan kumuh di Meksiko akibat keterbatasan energi dan mobilitas. Temuan ini dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan menyejahterakan masyarakat miskin perkotaan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Gobel dan Fendy Faizal, dengan judul **"Korelasi Identitas, Aktivitas dan Legalitas terhadap Munculnya Permukiman Kumuh Pasca Pandemi Covid-19."** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 100 responden di permukiman kumuh di Pohuwato Timur, Gorontalo. Penelitian ini menemukan bahwa identitas sosial dan aktivitas ekonomi memiliki korelasi positif dengan munculnya permukiman kumuh. Legalitas kepemilikan tanah tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan munculnya permukiman kumuh. Masyarakat yang memiliki identitas sosial yang

kuat dan terlibat dalam aktivitas ekonomi informal lebih cenderung tinggal di permukiman kumuh.

Penelitian tersebut memberikan informasi yang valuable tentang faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permukiman kumuh pasca pandemi Covid-19. Penelitian peneliti dapat berkontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih tinggal di area pinggir rel kereta api di kawasan Tanah Abang, dampak permukiman tersebut terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, dan upaya dalam menangani permukiman di area tersebut.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Arunga, Risnayati, dan Mega U yang berjudul **"Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan."** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kekumuhan di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan. Data dikumpulkan melalui survei yang melibatkan 100 responden, yang dipilih untuk mewakili populasi di wilayah tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antara berbagai faktor penyebab kekumuhan dan mengidentifikasi kontribusi masing-masing faktor terhadap kondisi permukiman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik faktor fisik maupun non-fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kekumuhan permukiman. Faktor fisik, seperti kondisi bangunan, kualitas infrastruktur, dan keberadaan fasilitas dasar, ditemukan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan faktor

non-fisik. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, drainase, dan akses air bersih, berkontribusi langsung terhadap rendahnya kualitas lingkungan hidup di permukiman kumuh. Namun, faktor non-fisik juga memainkan peran penting dalam memperburuk kekumuhan. Di antara faktor non-fisik, aspek ekonomi, seperti rendahnya pendapatan dan ketidakstabilan pekerjaan, menjadi penyebab dominan. Rendahnya pendapatan masyarakat menghambat mereka untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal atau mengakses layanan dasar yang lebih baik. Selain itu, faktor sosial, seperti kesadaran terhadap pentingnya lingkungan sehat, juga menjadi penghalang dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Satrio, Muhamad Ilham, dan Annisa M yang berjudul **"Kebertahanan Masyarakat Pada Permukiman Kumuh Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi Di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga."** Jurnal ini membahas kebertahanan masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga, dengan menyoroti aspek sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa jaringan sosial, seperti solidaritas warga melalui gotong royong, menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan masyarakat bertahan meski dalam kondisi sulit.

Dari segi ekonomi, masyarakat mengandalkan sektor informal, seperti usaha kecil atau pekerjaan harian, sebagai sumber penghidupan utama. Pendapatan mereka yang rendah menjadi tantangan besar, tetapi pemanfaatan sumber daya lokal memungkinkan mereka untuk tetap bertahan. Namun, sifat

sektor informal yang tidak stabil membuat masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi, yang memperparah ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini juga mengungkapkan tantangan lain yang signifikan, seperti buruknya infrastruktur dasar, keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang layak. Untuk mengatasi ini, peneliti merekomendasikan penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dinilai krusial untuk menciptakan solusi berkelanjutan.

Ketujuh, Mohammad Amin Lasaiba dalam jurnalnya yang berjudul **"Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur)"** mengkaji masalah perkotaan yang mencakup kemiskinan, permukiman kumuh, dan fenomena Urban Heat Island (UHI). Artikel ini merupakan telaah literatur yang menyelami berbagai studi dan data yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tiga isu utama tersebut yang saling berhubungan dalam konteks urbanisasi dan perkembangan kota. Peneliti menjelaskan bagaimana kemiskinan menjadi masalah kronis di kawasan perkotaan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Kajian ini mencakup definisi kemiskinan, faktor-faktor penyebab, serta dampaknya terhadap masyarakat urban. Mengeksplorasi fenomena permukiman kumuh sebagai konsekuensi dari urbanisasi yang tidak terencana dan tidak merata. Permukiman kumuh digambarkan sebagai area dengan kondisi sanitasi yang buruk, akses layanan dasar yang minim, dan kualitas

hidup yang rendah. Fenomena Urban Heat Island (UHI) dijelaskan sebagai peningkatan suhu di area perkotaan dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Artikel ini membahas penyebab UHI, seperti konversi lahan hijau menjadi area terbangun, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kenyamanan penduduk perkotaan.

Jurnal ini mencakup tiga isu besar dalam satu kajian, memberikan pandangan holistik tentang tantangan perkotaan. Penggunaan berbagai sumber literatur memberikan dasar yang kuat dan memperkaya diskusi tentang kemiskinan, permukiman kumuh, dan UHI. Mengaitkan fenomena global dengan konteks lokal, menjadikannya relevan untuk pembaca yang tertarik pada perkembangan perkotaan di negara-negara berkembang. Meskipun komprehensif, kedalaman analisis pada masing-masing isu terkadang kurang mendalam, mengingat cakupan topiknya yang luas. Jurnal ini lebih banyak bersifat literatur review daripada penelitian empiris, sehingga kurang memberikan data baru atau temuan lapangan. Diskusi tentang solusi atau intervensi untuk masalah-masalah yang diangkat masih kurang terperinci dan konkret.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Sari, Agistya Risna Sari, dan Mohammad Agung Ridlo. Jurnal tersebut yang berjudul **"Studi Literatur: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan"** mengulas berbagai faktor yang menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh di perkotaan melalui studi literatur. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai permukiman kumuh dan menjelaskan pentingnya memahami faktor penyebab untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Jurnal ini kemudian

mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini menyebutkan bahwa kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja di daerah perkotaan adalah penyebab utama.

Banyak penduduk yang bermigrasi ke kota dalam mencari pekerjaan namun berakhir tinggal di permukiman kumuh karena tidak mampu membeli atau menyewa rumah yang layak. Ketidakadilan sosial dan marginalisasi kelompok tertentu juga disorot sebagai penyebab utama. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan memperparah kondisi kehidupan di permukiman kumuh. Kurangnya perencanaan tata ruang yang efektif dan kebijakan perumahan yang tidak memadai disebut sebagai kontributor signifikan terhadap proliferasi permukiman kumuh. Jurnal ini juga menyinggung tentang korupsi dan implementasi kebijakan yang lemah.

Jurnal ini secara sistematis mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai faktor penyebab permukiman kumuh, memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai masalah ini. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang ada, mengaitkan temuan-temuan dari berbagai studi dan mengidentifikasi pola-pola umum yang muncul. Identifikasi faktor penyebab yang jelas dan terperinci dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. Sama seperti studi literatur lainnya, jurnal ini lebih banyak mengandalkan data sekunder tanpa memberikan data empiris yang spesifik dari satu lokasi tertentu. Meskipun faktor penyebab telah diidentifikasi dengan baik, artikel ini kurang memberikan solusi

konkret dan implementatif untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Jurnal ini mengkaji literatur dari berbagai konteks global tanpa fokus mendalam pada kasus spesifik di Indonesia, sehingga mungkin kurang relevan bagi pembaca lokal yang mencari solusi yang lebih aplikatif.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Araujo, Carla Magno, Winny Astuti, dan Galing Yudana yang berjudul **"Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta."** Jurnal tersebut mengulas berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya permukiman kumuh di kawasan Semanggi, Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris, mengandalkan data lapangan untuk menganalisis kondisi dan faktor-faktor penyebab permukiman kumuh di daerah tersebut. Penelitian ini dimulai dengan latar belakang mengenai kondisi permukiman di kawasan Semanggi, Surakarta. Peneliti menjelaskan bahwa kawasan ini telah lama dikenal sebagai area dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan kondisi permukiman yang buruk. Tingkat pendapatan yang rendah dan kurangnya kesempatan kerja yang layak menjadi penyebab utama. Banyak penduduk di kawasan Semanggi bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.

Pendidikan yang rendah dan ketidakmampuan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan memperparah kondisi sosial di kawasan ini. Hal ini menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kondisi lingkungan yang buruk, termasuk sanitasi yang tidak memadai dan infrastruktur dasar yang kurang, turut memperparah kondisi permukiman. Kurangnya akses

terhadap air bersih dan sistem pembuangan limbah yang layak juga menjadi masalah utama. Kurangnya intervensi dari pemerintah lokal dalam memperbaiki kondisi permukiman kumuh dan minimnya program perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah turut menjadi faktor penyebab.

Penggunaan data lapangan memberikan gambaran yang nyata dan konkret mengenai kondisi di kawasan Semanggi. Ini menambah kredibilitas dan relevansi penelitian bagi pembuat kebijakan dan masyarakat lokal. Penelitian ini secara spesifik meneliti kondisi di kawasan Semanggi, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor lokal yang berkontribusi terhadap masalah permukiman kumuh. Jurnal ini tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya memperbaiki kondisi permukiman. Jurnal ini lebih menekankan pada data empiris tanpa cukup mengaitkan temuan dengan teori-teori yang relevan dalam literatur akademis yang lebih luas. Beberapa rekomendasi yang diberikan mungkin terlalu umum dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek spesifik yang mungkin unik bagi kawasan Semanggi.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Krisandriyana, Maresty, Winny Astuti, Erma Fitriarini yang berjudul **"Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta."** Jurnal tersebut mengulas berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya permukiman kumuh di Surakarta. Penelitian ini memanfaatkan data empiris dan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan

permukiman kumuh di Surakarta. Peneliti mengidentifikasi beberapa faktor utama: Kemiskinan menjadi faktor utama yang memaksa banyak penduduk untuk tinggal di permukiman kumuh. Kurangnya lapangan kerja yang layak dan pendapatan yang rendah menyebabkan banyak keluarga tidak mampu mengakses perumahan yang layak. Pendidikan yang rendah dan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih memperparah kondisi permukiman kumuh.

Ketidakmampuan untuk meningkatkan kualitas hidup menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kualitas lingkungan yang buruk, termasuk kurangnya infrastruktur dasar seperti sanitasi yang layak dan sistem pembuangan limbah yang memadai, menyebabkan kondisi hidup yang tidak sehat dan berbahaya. Kurangnya kebijakan perumahan yang efektif dan perencanaan tata ruang yang tidak memadai berkontribusi terhadap proliferasi permukiman kumuh. Intervensi pemerintah yang minim dan implementasi kebijakan yang lemah juga menjadi faktor penting. Laju urbanisasi yang cepat tanpa diimbangi dengan perencanaan yang baik menyebabkan banyak penduduk migran mencari tempat tinggal di permukiman kumuh karena keterbatasan opsi perumahan yang terjangkau. Jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaan permukiman kumuh, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan.

Penggunaan data empiris dari Surakarta memberikan pandangan yang akurat dan relevan mengenai kondisi lokal, yang memperkuat validitas temuan penelitian. Jurnal ini tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga

memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Surakarta. Meskipun fokus pada Surakarta memberikan detail lokal yang baik, kurangnya perbandingan dengan kasus di daerah lain atau negara lain dapat membatasi pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini beroperasi dalam konteks yang lebih luas. Keterbatasan dalam data empiris, seperti sampel yang mungkin tidak representatif atau data yang tidak terkini, dapat mengurangi kekuatan generalisasi temuan. Meskipun memberikan rekomendasi, jurnal ini kurang mendetail dalam hal bagaimana rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan secara praktis di lapangan.

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh Oktarini, Maya Fitri, Tutur Lussetyowati, dan Primadella dengan judul **"Persepsi Pemukim terhadap Kualitas Lingkungan di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi, Palembang."** Jurnal tersebut mengkaji bagaimana penduduk di permukiman kumuh di sepanjang tepian Sungai Musi di Palembang memandang kualitas lingkungan tempat mereka tinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif pemukim mengenai kondisi lingkungan mereka. Jurnal ini berfokus pada persepsi penduduk mengenai kualitas lingkungan di permukiman kumuh di tepian Sungai Musi, Palembang. Peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Penduduk umumnya menyadari bahwa kondisi fisik lingkungan mereka buruk, termasuk sanitasi yang tidak memadai, air bersih yang sulit diakses, dan penumpukan sampah.

Mereka menyebutkan bahwa banjir dan pencemaran air merupakan masalah utama yang mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan hidup mereka. Banyak penduduk merasa khawatir tentang risiko kesehatan yang dihadapi, terutama penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan penyakit kulit. Mereka juga menyadari adanya risiko dari praktik-praktik yang tidak higienis dan kondisi sanitasi yang buruk. Penduduk memiliki pandangan yang beragam mengenai intervensi pemerintah. Sebagian merasa pemerintah tidak cukup memperhatikan kebutuhan mereka, sementara yang lain mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur meski merasa bahwa usaha tersebut belum mencukupi. Penduduk mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit, seperti membangun tanggul darurat untuk mencegah banjir dan menggunakan air sungai meskipun tercemar karena tidak ada alternatif lain.

Penggunaan wawancara dan observasi memberikan pandangan mendalam mengenai persepsi dan pengalaman penduduk, yang sering kali tidak terjangkau oleh data kuantitatif. Jurnal ini menyoroti perspektif subyektif penduduk, memberikan suara kepada komunitas yang sering kali terpinggirkan dalam diskusi kebijakan publik. Studi ini sangat relevan dengan konteks lokal di Palembang, sehingga temuan-temuannya dapat langsung diaplikasikan untuk perbaikan kebijakan dan program di wilayah tersebut. Karena fokus pada satu lokasi spesifik dan penggunaan metode kualitatif, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke permukiman kumuh lain dengan kondisi yang berbeda.

Buku yang pertama, dengan judul **"Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian S trategis"** karya Nurani Soyomukti. Buku tersebut merupakan pengantar yang komprehensif tentang ilmu sosiologi dan aplikasinya dalam menganalisis masalah-masalah sosial serta perubahan sosial. Buku ini memberikan dasar yang kuat tentang teori-teori sosiologi, menjelaskan berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis struktur sosial, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana fenomena sosial dapat dipahami dalam konteks perubahan sosial. Soyomukti menjelaskan konsep-konsep dasar seperti stratifikasi sosial, lembaga sosial, serta hubungan antara individu dan masyarakat dengan cara yang mudah dipahami, cocok untuk pembaca yang baru mengenal sosiologi.

Dalam buku ini, Soyomukti juga mengupas berbagai teori sosiologi klasik dan modern, mulai dari perspektif fungsionalisme, konflik, hingga interaksionisme simbolik. Peneliti memberikan penjelasan yang jelas mengenai peran teori-teori tersebut dalam menjelaskan dinamika sosial serta fenomena perubahan sosial dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana masyarakat berkembang, bagaimana struktur sosial terbentuk, dan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dalam konteks yang lebih luas.

Salah satu kekuatan buku ini adalah kemampuannya untuk menghubungkan teori sosiologi dengan analisis masalah-masalah sosial kontemporer. Soyomukti mengintegrasikan diskusi tentang isu-isu sosial yang

relevan, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, peran gender, dan perubahan teknologi, dengan cara yang menggugah pemikiran. Buku ini juga memperkenalkan kajian strategis dalam sosiologi, yang mengajak pembaca untuk berpikir lebih kritis tentang bagaimana solusi sosial dapat dirumuskan berdasarkan pemahaman sosiologis terhadap kondisi masyarakat.

Buku yang kedua, dengan judul **"Pengantar Teori-teori Sosial"** karya Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier; alih bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin. Buku tersebut adalah sebuah panduan komprehensif tentang berbagai teori sosial yang mendasari pemahaman kita terhadap masyarakat dan fenomena sosial. Buku tersebut menjelaskan teori fungsionalisme yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan.

Buku ini membantu menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dan kekuasaan antara pemerintah, pengembang properti, dan penduduk pemukiman liar dapat menyebabkan konflik yang terus-menerus. Analisis konflik ini dapat membantu dalam memahami perlawanan penduduk terhadap penggusuran dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Interaksionisme simbolik, yang berfokus pada interaksi sehari-hari dan makna yang dikonstruksi melalui interaksi sosial, dapat memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan sehari-hari penduduk di pemukiman liar. Buku ini menjelaskan bagaimana makna dan identitas dibentuk melalui interaksi sosial. Teori kritis, yang bertujuan untuk mengkritisi struktur kekuasaan dan ideologi dominan, sangat berguna dalam menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pemukiman liar. Buku ini

memperkenalkan konsep-konsep penting dari teori kritis yang dapat diterapkan untuk mengkritisi kebijakan urbanisasi dan pengembangan kota yang seringkali mengabaikan hak-hak penduduk miskin.

Buku yang ketiga, Buku Sociology oleh Anthony Giddens merupakan salah satu literatur terkemuka dalam bidang sosiologi yang memberikan pemahaman mendalam tentang teori-teori sosial, metode penelitian, dan isu-isu sosial kontemporer. Teori strukturasi Anthony Giddens yang menekankan hubungan dialektis antara agen dan struktur. Giddens berargumen bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi tindakan individu tetapi juga dihasilkan dan direproduksi melalui tindakan tersebut. Konsep dualitas struktur dalam teori Giddens menyatakan bahwa struktur dan agen saling terkait dan saling mempengaruhi.

Giddens juga menyoroti bagaimana globalisasi dan urbanisasi mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan individu. Migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik sering kali berakhir dengan ketidakpastian perumahan, yang menyebabkan munculnya pemukiman liar di area perkotaan. Giddens menekankan pentingnya metode penelitian yang komprehensif dalam sosiologi, termasuk metode kualitatif dan kuantitatif. Buku Giddens membahas struktur sosial dan mobilitas sosial, yang sangat relevan dalam konteks pemukiman liar. Analisis tentang bagaimana struktur kelas dan kesempatan ekonomi mempengaruhi mobilitas sosial dapat membantu dalam memahami mengapa penduduk memilih untuk tinggal di pemukiman liar. Faktor-faktor seperti kurangnya akses ke perumahan yang

terjangkau, pendidikan, dan pekerjaan formal semuanya berperan dalam mempertahankan kondisi pemukiman informal.

Giddens menawarkan kritik terhadap proses modernitas yang dapat digunakan untuk menganalisis pemukiman liar sebagai produk dari kebijakan pembangunan yang tidak merata dan eksklusi sosial. Konsep-konsep Giddens tentang agen dan struktur bisa diterapkan untuk memahami interaksi antara penduduk pemukiman liar dan kebijakan publik. Giddens menekankan pentingnya memahami keseharian dalam analisis sosiologis. Dalam jurnal peneliti, analisis kehidupan sehari-hari penduduk pemukiman liar di Tanah Abang dapat memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana mereka mengatur ruang hidup, mengelola sumber daya yang terbatas, dan membangun komunitas dalam kondisi yang sulit. Pendekatan ini menekankan bahwa meskipun hidup dalam kondisi marginal, penduduk tetap memiliki agensi dan kreativitas.

Buku keempat, Staging the Slums, Slumming the Stage oleh J. Chris Westgate mengeksplorasi representasi kelas, kemiskinan, etnisitas, dan seksualitas di teater Amerika antara tahun 1890 dan 1916. Westgate membahas bagaimana teater Amerika pada periode tersebut menggambarkan kehidupan di daerah kumuh. Representasi ini sering kali penuh dengan stereotip dan bias, namun juga memberikan pandangan sekilas tentang realitas kehidupan di tengah kemiskinan. Penting untuk memahami bagaimana media dan budaya populer bisa membentuk persepsi publik tentang kemiskinan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan publik dan sikap sosial. Teater sering digunakan sebagai alat kritik sosial, sebagaimana dibahas oleh Westgate.

Buku Westgate menyoroti kesenjangan kelas dan bagaimana ini digambarkan dalam teater. Westgate juga membahas bagaimana etnisitas mempengaruhi representasi dan pengalaman kemiskinan. Representasi identitas dan komunitas di teater bisa memberikan wawasan tentang bagaimana penduduk pemukiman liar membentuk identitas kolektif dan solidaritas komunitas. Westgate membahas bagaimana seksualitas digambarkan dalam konteks kemiskinan, yang sering kali penuh dengan stereotip dan penghakiman moral. Dalam pemukiman liar, isu seksualitas mungkin juga muncul dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi dan kekerasan. Gender adalah aspek penting yang dibahas oleh Westgate, terutama dalam kaitannya dengan kemiskinan dan marginalisasi. Analisis gender dapat membantu memahami peran perempuan di pemukiman liar, tantangan yang mereka hadapi, dan strategi yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Buku Westgate menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis representasi sosial di teater. Pendekatan ini bisa diterapkan dalam jurnal peneliti untuk menggabungkan perspektif sosiologis, antropologis, dan kultural dalam menganalisis pemukiman liar. Pendekatan interdisipliner dapat memberikan analisis yang lebih kaya dan mendalam tentang kompleksitas sosial dan ekonomi di pemukiman liar. Pemahaman tentang bagaimana narasi dan representasi mempengaruhi persepsi publik.

Buku kelima, “**Planet of Slums”** oleh Mike Davis adalah karya seminal yang mengeksplorasi fenomena urbanisasi global dan munculnya permukiman kumuh di kota-kota besar di seluruh dunia. Dengan penekanan pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang menciptakan dan memperburuk kondisi

kehidupan di kawasan kumuh. Mike Davis mendokumentasikan bagaimana urbanisasi cepat di negara-negara berkembang sering kali tidak diikuti dengan perencanaan kota yang memadai, mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Davis menguraikan bagaimana kemiskinan perkotaan berbeda dengan kemiskinan pedesaan, terutama dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Salah satu poin utama Davis adalah dampak kebijakan neo-liberal terhadap perumahan perkotaan, yang sering kali menguntungkan pengembang properti besar dan mengabaikan kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin. Di Jakarta, kebijakan yang lebih menguntungkan pembangunan komersial dan real estate elit sering kali mengakibatkan penggusuran pemukiman liar.

Davis juga membahas bagaimana kota-kota sering kali tersegregasi secara sosial dan ekonomi, dengan kawasan kumuh terpinggirkan dari pusat ekonomi dan politik. Davis mengamati bahwa permukiman kumuh sering kali memiliki struktur sosial yang kuat dan solidaritas komunitas yang membantu penduduk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Penduduk pemukiman liar mungkin mengembangkan jaringan sosial dan mekanisme bantuan timbal balik untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Buku tersebut menyoroti bagaimana penduduk permukiman kumuh sering kali menunjukkan inovasi dan ketahanan yang luar biasa dalam mengatasi kekurangan sumber daya. Mike Davis menyediakan kajian empiris yang luas tentang kondisi permukiman kumuh di berbagai kota di dunia. Teori-teori tentang urbanisasi dan kemiskinan yang dibahas oleh Davis dapat membantu memperkuat kerangka teoretis dalam jurnal peneliti. Misalnya, konsep

tentang marginalisasi perkotaan dan ekonomi informal dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kerja dan pendapatan penduduk di pemukiman liar. Integrasi teori-teori ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan rekomendasi kebijakan.

Buku keenam, karangan James C. Scott tahun 1985, **"Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance,"** memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kelompok orang dalam posisi subordinat, khususnya petani miskin, melawan struktur kekuasaan yang menindas. Scott menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu terwujud dalam bentuk konfrontasi terbuka atau gerakan revolusioner berskala besar. Sebaliknya, ia menyoroti bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konsepnya tentang bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari mencakup tindakan-tindakan seperti memperlambat pekerjaan, berpura-pura tidak tahu, melakukan sabotase kecil-kecilan, secara halus menghindari perintah, dan mengekspresikan kritik melalui gosip atau sarkasme. Meskipun tampak sepele dan tidak teratur, tindakan-tindakan ini merupakan cara untuk mengekspresikan penolakan terhadap ketidakadilan dan upaya untuk mempertahankan ruang dan otonomi mereka dalam kehidupan dalam menghadapi tekanan-tekanan struktural.

Scott berpendapat bahwa bentuk perlawanan ini bersifat laten tetapi memiliki ketahanan dan pengaruh sosial yang besar. Ia menolak pandangan konvensional yang menyamakan ketundukan eksternal dengan penerimaan internal terhadap dominasi. Menurutnya, kepatuhan yang tampak sering kali menyembunyikan ekspresi perlawanan yang hati-hati dan strategis. Dengan

demikian, buku ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman hubungan kekuasaan dari bawah dan memperluas konsep perlawanan dengan mempertimbangkan dimensi simbolik, budaya, dan keseharian yang sering diabaikan oleh analisis politik konvensional.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Permukiman Kumuh

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat serta dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Permen PUPR No.14/PRT/M/2018, kriteria kumuh berdasarkan kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

Permukiman kumuh adalah kawasan hunian yang memiliki karakteristik yaitu, kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, kepadatan bangunan yang tinggi, prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak memadai, dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tidak teratur dan tidak terencana. Fenomena permukiman kumuh telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia.

Pemukiman kumuh berkembang tanpa izin resmi dari pemerintah dan tanpa melalui proses perencanaan yang memadai. Ini berarti bangunan didirikan

secara spontan dan tidak mengikuti standar konstruksi yang ditetapkan. Rumah-rumah di pemukiman kumuh sering dibangun dengan bahan bangunan yang murah dan tidak tahan lama seperti kayu bekas, seng, dan bahan daur ulang lainnya. Infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, air bersih, dan listrik sering kali minim atau tidak ada sama sekali.

Area pemukiman kumuh biasanya sangat padat dengan banyak rumah berdiri berdekatan satu sama lain. Hal ini mengakibatkan kurangnya ruang terbuka, ventilasi yang buruk, dan minimnya privasi. Penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh umumnya berasal dari kelompok berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli atau menyewa rumah di kawasan yang lebih layak. Tingginya harga tanah dan perumahan di kota menjadi hambatan utama. Kurangnya perumahan yang terjangkau di kota memaksa banyak orang untuk mencari alternatif tempat tinggal di area informal. [8]

Pertumbuhan penduduk kota yang cepat tanpa diimbangi dengan penyediaan perumahan yang memadai memaksa banyak orang untuk tinggal di pemukiman kumuh. Urbanisasi sering kali membawa arus migrasi dari pedesaan ke perkotaan dalam mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan adalah salah satu faktor utama yang mendorong terbentuknya pemukiman kumuh. Para migran ini sering kali tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja perkotaan dan akhirnya tinggal di pemukiman kumuh.[9]

---

[8] Putra, H. A. (2018). Tantangan Perumahan Terjangkau di Perkotaan: Studi Kasus Jakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota,* 9(3), 129-140.
[9] Hartono, S. (2019). Migrasi Pedesaan ke Perkotaan dan Dampaknya pada Permukiman Informal. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 87-98.

1.6.2 Konsep Masyarakat Miskin Kota

Masyarakat miskin kota merupakan kelompok sosial yang hidup di kawasan perkotaan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah, seringkali tinggal di pemukiman kumuh atau kawasan yang tidak layak huni. Kelompok ini kerap menghadapi berbagai permasalahan kompleks seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Mayoritas dari mereka terdiri atas orang migran dan buruh yang mencari penghidupan di kota besar namun sering kali tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Menurut *Oscar Lewis*, masyarakat miskin kota kerap terjebak dalam "budaya kemiskinan" (*culture of poverty*), yaitu pola hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang menghambat mereka untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini sering kali dialami oleh orang migran yang pindah ke kota dengan harapan meningkatkan taraf hidup, tetapi justru menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, sehingga bergantung pada pekerjaan informal yang penghasilannya tidak menentu.[10]

Sementara itu, *John Friedman* dalam teorinya tentang pembangunan masyarakat perkotaan menyebutkan bahwa kelompok buruh dan migran di kota sering kali menjadi korban marginalisasi akibat kebijakan pembangunan yang tidak inklusif. Mereka tersingkir dari pusat-pusat ekonomi dan sosial kota, sulit mengakses perumahan layak, dan sering dipaksa tinggal di pemukiman kumuh

[10] Oscar Lewis, "The Culture of Poverty," *Scientific American* 215, no. 4 (1966): 19–25.

seperti bantaran sungai atau rel kereta api. Kondisi ini memperbesar kesenjangan sosial di kota.[11]

1.6.3 Lahan/Tanah sebagai Ruang yang Diperebutkan di Perkotaan

Lahan atau tanah di perkotaan merupakan salah satu sumber daya paling berharga dan strategis. Dengan semakin pesatnya urbanisasi, kebutuhan akan lahan untuk berbagai kepentingan seperti perumahan, industri, perdagangan, dan infrastruktur publik semakin meningkat. Namun, ketersediaan lahan yang terbatas membuatnya menjadi objek persaingan dan perebutan di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang, masyarakat miskin kota, dan kelompok swasta lainnya.

Menurut David Harvey, kota adalah ruang yang terus menerus diproduksi dan direproduksi melalui dinamika kapitalisme. Harvey berpendapat bahwa lahan di perkotaan tidak hanya memiliki nilai guna (*use value*), tetapi juga nilai tukar (*exchange value*) yang menjadi sasaran akumulasi kapital.[12] Dalam konteks ini, perebutan lahan sering kali melibatkan konflik kepentingan antara kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak dan upaya kapitalis untuk memaksimalkan keuntungan melalui gentrifikasi atau pembangunan komersial.

Dalam konsepnya tentang hak atas kota (*the right to the city*), Henri Lefebvre menyatakan bahwa ruang perkotaan, termasuk lahan, seharusnya menjadi milik semua orang yang hidup di dalamnya. Namun, dalam praktiknya, ruang ini lebih sering dikontrol oleh kekuatan kapital dan institusi yang

[11] John Friedman, *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela* (Cambridge: MIT Press, 1966).
[12] David Harvey, *The Limits to Capital* (Oxford: Basil Blackwell, 1982).

mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin kota, seperti para buruh dan migran. Perebutan lahan di perkotaan, menurut Lefebvre, mencerminkan ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh eksklusi sistemik terhadap kelompok marjinal.[13]

Salah satu isu utama dalam perebutan lahan di perkotaan adalah ancaman penggusuran dan kurangnya jaminan hukum atas tanah yang mereka tempati. Ini dapat menyebabkan konflik sosial dan ketidakstabilan. Dalam konteks jaminan hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa tanah di Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, implementasinya sering kali menghadapi kendala, terutama dalam konflik lahan antara masyarakat miskin kota dan pengembang.[14]

1.6.4 Strategi Bertahan Hidup

Masyarakat miskin kota sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak, sumber daya ekonomi, serta tekanan dari kebijakan pemerintah yang tidak selalu berpihak pada mereka. Dalam menghadapi kondisi tersebut, mereka mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup yang memungkinkan mereka untuk tetap eksis dalam situasi yang penuh keterbatasan. James C. Scott, dalam bukunya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (1985), menjelaskan bahwa kelompok subordinat menggunakan perlawanan sehari-hari (*everyday resistance*)

[13] Henri Lefebvre, *The Production of Space* (Oxford: Wiley-Blackwell, 1991).
[14] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

sebagai bentuk strategi bertahan hidup tanpa harus melakukan konfrontasi terbuka terhadap pihak berwenang.

Scott berpendapat bahwa strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh kelompok marginal lebih banyak bersifat tersembunyi dan tidak langsung. Mereka tidak melakukan perlawanan terbuka, tetapi lebih mengandalkan cara-cara halus yang tetap memungkinkan mereka bertahan. Masyarakat miskin kota cenderung menghindari konflik terbuka dengan pemerintah atau aparat keamanan. Ketika menghadapi ancaman penggusuran, mereka sering kali memilih untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada sembari mencari cara lain untuk tetap tinggal di lokasi tersebut. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi mendorong masyarakat miskin untuk memanfaatkan apa yang ada secara maksimal, seperti pemanfaatan ruang sempit untuk usaha kecil-kecilan atau menyambung listrik dan air secara ilegal.[15]

Bourdieu (1986) menekankan bahwa bertahan hidup tidak hanya bergantung pada modal ekonomi tetapi juga pada modal sosial dan budaya. Dalam konteks masyarakat miskin kota, mereka menggunakan jaringan sosial sebagai alat untuk bertahan. Masyarakat miskin membangun jaringan sosial yang kuat untuk berbagi informasi, sumber daya, dan bantuan dalam menghadapi kesulitan. Misalnya, ketika ada satu keluarga yang terkena dampak penggusuran, warga sekitar sering kali memberikan dukungan dalam bentuk tempat tinggal sementara atau bantuan finansial. Masyarakat miskin juga mempertahankan nilai-nilai budaya mereka untuk memperkuat identitas dan daya tahan terhadap tekanan

[15] James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven: Yale University Press, 1985)

eksternal, seperti dengan mempertahankan pola kerja kolektif dalam sektor informal.[16]

Sen (1981) dalam teorinya tentang *entitlement approach* menjelaskan bahwa strategi bertahan hidup berkaitan dengan akses terhadap sumber daya. Dalam konteks masyarakat miskin kota, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja, serta diskriminasi struktural dalam perekrutan tenaga kerja. Akibatnya, mereka bergantung pada sektor informal yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang ketat. Masyarakat miskin kota menjalankan berbagai usaha kecil, seperti berjualan makanan, mengumpulkan barang bekas, menjadi tukang parkir, atau bekerja sebagai buruh harian di sektor konstruksi dan rumah tangga. Sektor informal ini menjadi penopang utama bagi banyak keluarga miskin, meskipun sering kali tidak memberikan jaminan sosial maupun perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, mereka juga memanfaatkan jaringan sosial untuk mendapatkan pekerjaan atau bantuan ekonomi secara tidak resmi. [17]

Chambers (1983) mengembangkan konsep *livelihood strategies*, yang menekankan bagaimana masyarakat miskin menggunakan aset yang tersedia untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks masyarakat miskin kota, strategi ini melibatkan berbagai upaya untuk mempertahankan kehidupan dengan memanfaatkan segala bentuk modal yang dimiliki, baik

---

[16]Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. J. Richardson (New York: Greenwood, 1986), hlm. 241–258.

[17] Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Oxford University Press, 1981)

keterampilan, jaringan sosial, maupun sumber daya yang ada. Masyarakat miskin menggunakan keterampilan mereka untuk mencari pekerjaan atau menciptakan peluang ekonomi dalam kondisi yang sulit. Misalnya, mereka mempelajari keterampilan baru yang dapat digunakan dalam sektor informal, seperti menjadi tukang bangunan, pedagang kaki lima, atau pekerja rumahan. Selain itu, mereka juga mengandalkan dukungan dari keluarga atau komunitas untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Mereka mengembangkan strategi adaptif terhadap kebijakan pemerintah, seperti berpindah tempat sementara ketika terjadi penggusuran dan kembali lagi setelah situasi mereda. Beberapa kelompok bahkan membangun permukiman semi-permanen yang memungkinkan mereka untuk kembali dengan cepat setelah penggusuran.[18]

1.6.5 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep

Sumber: Dikonseptualisasi dari Temuan Penelitian, 2025

Skema 1.2 menggambarkan bagaimana konsep-konsep yang telah dijelaskan dalam penelitian ini saling terkait dan memberikan pemahaman yang

[18]Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983).

kompherensif tentang bagaimana pola pemukiman masyarakat di area rel kereta api serta merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Masyarakat miskin kota sering kali merupakan kelompok yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Mereka berada dalam kondisi kemiskinan yang menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, hunian, dan pekerjaan yang layak. Keterbatasan ini semakin memperdalam proses marginalisasi, di mana mereka terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam situasi seperti ini, mereka memiliki sedikit peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Urbanisasi dan migrasi yang pesat menjadi faktor utama berkembangnya permukiman kumuh di kota-kota besar. Banyak masyarakat dari pedesaan bermigrasi ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, keterbatasan keterampilan, tingginya persaingan kerja, serta biaya hidup yang mahal menyebabkan mereka kesulitan memperoleh hunian yang layak. Akibatnya, mereka memilih untuk tinggal di kawasan permukiman informal atau kumuh, yang umumnya memiliki akses infrastruktur dan fasilitas dasar yang sangat terbatas. Permukiman kumuh menjadi solusi bagi masyarakat miskin kota untuk tetap bertahan di tengah keterbatasan ekonomi. Meskipun memiliki berbagai risiko, seperti penggusuran dan minimnya layanan dasar, permukiman ini tetap menjadi pilihan utama karena biaya hidup yang lebih rendah dan kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi.

Untuk menghadapi keterbatasan ekonomi dan hukum, masyarakat miskin kota mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup. Mereka banyak bekerja di sektor informal, seperti berdagang kecil-kecilan, menjadi tukang parkir, pemulung, buruh harian, atau pekerja rumah tangga. Sektor informal ini lebih fleksibel dan tidak membutuhkan syarat administratif yang rumit, meskipun tidak memberikan jaminan sosial maupun perlindungan hukum. Selain itu, jaringan sosial juga menjadi aset penting bagi mereka. Solidaritas antar warga sering kali muncul dalam bentuk gotong royong, pinjaman uang tanpa bunga, atau berbagi informasi mengenai peluang pekerjaan dan bantuan sosial. Dalam kondisi tertentu, mereka juga mengandalkan program bantuan dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Permukiman kumuh sering kali berdiri di atas lahan perkotaan yang strategis. Karena status kepemilikan tanah yang tidak jelas, masyarakat miskin kota sering menghadapi ancaman penggusuran. Pemerintah dan pemilik modal melihat lahan-lahan ini sebagai aset yang bernilai tinggi untuk pengembangan kota, sehingga konflik terkait kepemilikan tanah pun sering terjadi. Dalam kondisi ini, masyarakat miskin kota dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang tinggi. Mereka tidak memiliki hak kepemilikan resmi, sehingga rentan terhadap penggusuran paksa. Beberapa kelompok masyarakat melakukan perlawanan dengan berbagai cara, seperti negosiasi dengan pemerintah atau mencari dukungan dari aktivis dan organisasi sosial. Namun, tanpa adanya jaminan hukum yang kuat, posisi mereka tetap lemah dalam menghadapi kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar.

1.7 Metodologi Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar konsep yang telah dibahas. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dalam konteks yang alami dan mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman dan persepsi masyarakat yang tinggal di area pinggir rel kereta api di Kawasan Tanah Abang.[19] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks yang spesifik dan terperinci.[20] Studi kasus ini berfokus pada kawasan Tanah Abang sebagai representasi dari pemukiman informal di area pinggir rel kereta api. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pemukiman tersebut.

1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu-individu dan keluarga yang tinggal di pemukiman informal di area pinggir rel kereta api di Kawasan Tanah Abang, Jakarta. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Penduduk yang telah tinggal di lokasi pemukiman tersebut minimal selama tiga tahun. Hal ini untuk

---

[19] Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
[20] Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications.

memastikan bahwa partisipan memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan informasi yang mendalam mengenai pola pemukiman dan dinamika sosial. Individu yang berusia 18 tahun ke atas, sehingga dapat memberikan persetujuan partisipasi dan memiliki pengalaman serta pemahaman yang cukup tentang kehidupan di area tersebut. Partisipan dipilih dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai pola pemukiman dan interaksi komunitas. Termasuk kepala keluarga, ibu rumah tangga, pekerja, dan tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan komunitas setempat.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sepanjang pinggir area rel kereta Stasiun Tanah Abang tepatnya di Jalan Citarum, RT.18/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Barat. Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari 2024. Peneliti memilih lokasi tersebut atas dasar ketertarikan penelitian dengan permukiman yang ada di sepanjang pinggir rel kereta api Tanah Abang. Peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miskin Kota Di Bantaran Rel Kereta Api Kawasan Tanah Abang Jakpus"

1.7.3 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memegang peranan penting, meliputi seluruh tahapan proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penyajian hasil secara menyeluruh, dengan penekanan pada pendekatan kualitatif. Sebagai instrumen

utama dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai pengamat aktif yang turut serta secara langsung dalam dinamika sosial di lapangan.

Peran peneliti dimulai pada tahap awal, yaitu perencanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian secara mendalam dan menetapkan tujuan penelitian yang jelas. Peneliti juga menyusun kerangka konseptual yang menjadi dasar pemahaman fenomena sosial yang diteliti, dalam hal ini kehidupan masyarakat miskin perkotaan di permukiman kumuh sepanjang rel kereta api di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, peneliti berperan dalam proses pengumpulan data, yang meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, studi pustaka, dokumentasi, dan triangulasi data. Peneliti mengamati secara langsung aktivitas dan kondisi sosial masyarakat di lapangan selama beberapa hari pengamatan dan melakukan wawancara dengan warga masyarakat. Setiap proses pengumpulan data dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan mencerminkan kenyataan yang ada.

Setelah semua data terkumpul, peneliti berperan dalam proses analisis data. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, peneliti berupaya memahami makna tersembunyi di balik pengalaman hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Peneliti berupaya menangkap dinamika sosial, strategi penanggulangan, dan berbagai faktor yang membentuk kondisi sosial ekonomi mereka. Selain itu, peneliti juga bertanggung jawab untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis, jelas, dan mendalam. Peneliti menyajikan temuannya dengan

dukungan data yang kuat dan autentik, baik berupa kutipan wawancara maupun dokumentasi lapangan. Selain menyampaikan fakta, peneliti juga berperan dalam menguraikan hubungan antarkonsep secara rinci sehingga pembaca dapat memahami kompleksitas kehidupan masyarakat miskin perkotaan di wilayah yang diteliti. Melalui semua peran tersebut, peneliti berupaya agar penelitian tidak sekadar bersifat akademis, tetapi juga berkontribusi untuk memahami dan memetakan permasalahan sosial yang dihadapi kelompok marginal di wilayah perkotaan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian karena menjadi langkah utama untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipilih mengacu pada buku *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* edisi ke-4 karya Creswell yang diterbitkan pada tahun 2014. Teknik yang digunakan meliputi:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu di bantaran rel kereta api, Jalan Citarum, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Pengamatan dilakukan pada beberapa hari yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang aktivitas sehari-hari masyarakat, kondisi fisik lingkungan tempat tinggal, dan pola interaksi sosial antar warga. Peneliti mencatat semua temuan lapangan secara rinci dalam bentuk

catatan lapangan dan dokumentasi visual, seperti foto-foto, yang menangkap kondisi sebenarnya dari permukiman tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada informan secara sepihak. Jawaban yang diberikan oleh informan akan dicatat atau direkam secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara yang ideal ditandai dengan adanya interaksi langsung secara tatap muka antara peneliti dan informan, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) antara pewawancara dan informan untuk menggali informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Selain wawancara formal, peneliti juga sering melakukan percakapan informal dengan masyarakat bantaran rel kereta api, Jalan Citarum, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Percakapan informal ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang dapat digunakan sebagai data penelitian.

c. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, foto, atau video yang telah direkam sebelumnya. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan gambar dan video di lokasi penelitian yang relevan, lalu dianalisis lebih lanjut. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang sesuai dengan kenyataan serta berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini,

dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa rekaman wawancara yang dilakukan menggunakan *handphone.*

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada makna, konteks sosial, dan pengalaman subyektif informan. Terdapat tiga tahapan utama dalam proses analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data, ketika peneliti mulai melakukan observasi langsung di kawasan permukiman bantaran rel kereta api di Jalan Citarum, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melalui observasi tersebut, peneliti mencatat berbagai informasi penting mengenai kondisi fisik permukiman, interaksi sosial warga, serta aktivitas ekonomi yang berlangsung. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pola bertahan hidup masyarakat, aspek sosial-ekonomi, serta kondisi infrastruktur permukiman.

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, kutipan wawancara, serta dokumentasi visual. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami alur peristiwa, melihat pola-pola sosial yang muncul, serta mengaitkan antara satu temuan dengan temuan lainnya. Penyajian data juga menjadi dasar

dalam menyusun interpretasi terhadap realitas sosial yang diamati dan dirasakan oleh warga di kawasan tersebut. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan refleksi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna mendalam dari pengalaman hidup masyarakat miskin kota yang tinggal di kawasan kumuh tersebut. Peneliti merumuskan temuan-temuan utama, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan strategi bertahan hidup, kondisi sosial ekonomi, serta relasi warga dengan struktur kota secara lebih luas. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara dan terbuka terhadap penguatan maupun revisi, seiring dengan berjalannya proses analisis yang terus berkembang hingga akhir penelitian.

1.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas hasil penelitian kualitatif dengan cara mengonfirmasi data dari berbagai perspektif, sumber, metode, atau teori.[21]Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber informasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, seperti warga yang tinggal di bantaran rel dan tokoh masyarakat. Setiap informan memberikan perspektif yang berbeda mengenai kondisi permukiman, tantangan yang dihadapi, serta strategi bertahan hidup di lingkungan kumuh. Misalnya, informasi mengenai ancaman penggusuran dan respons warga dikonfirmasi dari sudut pandang warga

[21] Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.

biasa serta diperkuat dengan wawancara bersama Ketua RT setempat. Hal ini membantu peneliti melihat gambaran yang lebih utuh dari suatu peristiwa atau dinamika sosial yang sedang dikaji.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lokasi permukiman. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap kondisi fisik lingkungan, interaksi sosial antar warga, serta aktivitas ekonomi yang berlangsung di sekitar bantaran rel. Hasil observasi kemudian dibandingkan dengan data hasil wawancara untuk melihat konsistensi dan perbedaan informasi yang diperoleh. Sementara itu, dokumentasi visual digunakan sebagai bahan refleksi dan pendukung naratif untuk memperkuat deskripsi konteks lapangan. Melalui proses triangulasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Dalam hal ini, triangulasi dilakukan terhadap data yang berasal dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat validitas dan akurasi data yang disampaikan, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Triangulasi ini juga memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas sosial yang terjadi di lapangan secara lebih menyeluruh, sekaligus meminimalkan bias individual baik dari informan maupun peneliti itu sendiri. Jika ditemukan ketidaksesuaian, peneliti melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan informan atau menambah data observasi untuk memastikan keabsahan informasi. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih kredibel, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, disusun dalam lima bab utama yang membentuk struktur keseluruhan penelitian secara sistematis. Struktur tersebut terdapat bab pendahuluan mengenai topik penelitian, selanjutnya dua bab yang berfokus pada data empiris, dilanjutkan dengan satu bab analisis, dan diakhiri dengan satu bab kesimpulan dan saran.

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang ingin dijawab melalui proses penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka konseptual yang menjadi landasan berpikir, serta metode penelitian yang mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, subjek, lokasi, dan waktu penelitian, serta peran peneliti. Di bagian akhir terdapat sistematika penulisan sebagai panduan alur isi skripsi.

Bab II berfokus pada profil warga yang tinggal di bantaran rel kereta api kawasan Tanah Abang. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi permukiman kumuh yang berkembang di area tersebut, menjelaskan sejarah terbentuknya kawasan permukiman, serta membahas status kepemilikan lahan yang dihuni. Selain itu, dibahas pula kondisi fasilitas dan utilitas yang tersedia di lingkungan permukiman, serta karakteristik sosial-ekonomi para penghuni, seperti latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kondisi keluarga.

Bab III menguraikan pola permukiman masyarakat di bantaran rel, termasuk kondisi fisik bangunan dan lingkungan sekitar yang padat dan tidak terencana. Bab ini juga membahas aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur

dasar dan fasilitas publik, seperti air bersih, sanitasi, transportasi, serta pendidikan dan layanan kesehatan. Lebih lanjut, bab ini menggali berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya permukiman tersebut, termasuk alasan migrasi, keterbatasan ekonomi, dan peran jejaring sosial dalam memilih lokasi hunian.

Bab IV membahas secara mendalam strategi bertahan hidup yang diterapkan oleh masyarakat bantaran rel Tanah Abang dalam menghadapi berbagai tekanan struktural dan keterbatasan ekonomi. Strategi ini mencakup usaha ekonomi kecil, penghematan kebutuhan sehari-hari, serta dukungan jaringan sosial yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi rentan. Di samping itu, pekerjaan informal dan praktik negosiasi terhadap lembaga formal seperti PT KAI juga dianalisis. Seluruh temuan dianalisis menggunakan teori survival dari James C. Scott yang menjelaskan bagaimana kelompok marginal menggunakan bentuk perlawanan tersembunyi (everyday resistance) untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian, merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di awal. Bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan untuk pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya

1.8 Keterbatasan Penelitian

Selama proses pengumpulan data, penelitian ini menghadapi keterbatasan akses informasi dari manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI), khususnya dari Daerah Pengelolaan dan Operasional (DAOP) Stasiun Tanah Abang 1, Jakarta.

Peneliti berupaya menjalin komunikasi formal melalui surat permohonan wawancara dan klarifikasi data. Namun, tanggapan yang diterima kurang jelas dan bahkan terkesan bertele-tele. Dalam beberapa kesempatan, tanggapan tersebut menunjukkan isyarat penolakan halus, sehingga menyulitkan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari lembaga terkait. Mengingat pentingnya informasi dari manajemen stasiun, sebagai salah satu aktor yang memengaruhi dinamika ruang perkeretaapian, peneliti berupaya mencari sumber data alternatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mewawancarai petugas keamanan (SATPAM) di Stasiun Tanah Abang yang memiliki pengetahuan praktis dan pengalaman langsung dengan aktivitas serta interaksi sosial di area tersebut. Wawancara ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi minimnya data kelembagaan dan menjadi bagian dari proses triangulasi data untuk memperkuat keabsahan temuan penelitian ini.